PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

REVIEW PERTAMA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, penyusunan Renstra Perangkat Daerah difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pangan sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 ini ditujukan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pangan dan untuk Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, tugas Dinas Pertanian dan Pangan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, Ketahanan Pangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di Bidang Pertanian, Kehewanan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Kehewanan dan Perikanan, terdiri dari :
   a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan;
   b. Seksi Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan;
4. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   a. Seksi Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan;
   b. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. Bidang Pertanian, terdiri dari :
   a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budidaya Pertanian;
   b. Seksi Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh pegawai sebanyak 59 orang PNS, 10 orang Naban yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala Dinas	: -	
Sekretaris	: Pembina TK I/Gol IV b	1 orang
Kepala Bidang	: Pembina /Gol. IVa	2 orang
	: Penata TK I/Gol III d	1 orang
Kepala Sub.Bagian	: Pembina /Gol. IVa	1 orang
	: Penata /Gol. III c	1 orang
Kepala Seksi	: Pembina /Gol IV a	1 orang

	:	Penata TK I/Gol. III d	4 orang
Staf	:	Pembina TK I/Gol IV b	1 orang
	:	Penata /Gol. III c	4 orang
	:	Penata Muda TK I/Gol. III b	7 orang
	:	Penata Muda/Gol. III a	4 orang
	:	Pengatur TK I/Gol. II d	5 orang
	:	Pengatur /Gol. II c	10 orang
	:	Pengatur muda /Gol. II a	10 orang
	:	Juru / I c	2 orang
Penyuluh Pertanian	:	Pembina TK I/Gol IV b	1 orang
	:	Penata TK I/Gol. III d	3 orang
Medik Veteriner	:	Penata /Gol. III d	1 orang
Tenaga Bantu	:	-	10 orang

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017

Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	: 2 orang
2	S1	: 24 orang
3	D3	: 4 orang
4	SMA	: 23 orang
5	SMP	: 13 orang
6	SD	: 3 orang

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Th 2017

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Personil	%
1	Pertanian	: 16 orang	25,8
2	Peternakan	: 2 orang	4,8
3	Perikanan	: 1 orang	1,6
4	Dokter Hewan	: 7 orang	11,3
5	Kesehatan Hewan	: 2 orang	1,6
6	Lainnya	: 41 orang	54,8

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Jumlah sarana & prasarana kerja :

No	Jenis Aset	: Luas/Jumlah
I	TANAH	

	Tanah Darat	:	19.525	m^2
	Tanah Sawah	:	45.145	m^2
	Tanah Bangunan Kantor	:	400	m^2
	Tanah kolam air tawar	:	10.000	m^2
		:		
II	BANGUNAN	:		
	Gedung Kantor Dinas	:	400	m^2
	RPH	:	7.811	m^2
	Poliklinik Hewan	:	150	m^2
	Balai Penyuluh Pertanian	:	26.880	m^2
	BBI Mendungan	:	3000	m^2
	BBI Nitikan	:	12.839	m^2
	Sub Raiser	:	1.412	m^2
III	KENDARAAN DAN PERALATAN			
	Kendaraan roda tiga	:	5	buah
	Kendaraan roda dua	:	27	buah
	Ruang rapat	:	3	buah
	Mesin ketik	:	5	buah
	Komputer	:	23	buah
	Lap top	:	5	buah
	Printer	:	15	Buah
	LCD Proyektor	:	6	buah
	Telepon/mesin fax	:	4	buah
	Kamera	:	4	buah
	Handycam	:	2	buah
	Handy Talky	:	2	buah
	TV Color	:	1	buah
	Wireless	:	3	buah
	Meja Kerja	:	109	buah
	Kursi Kerja	:	86	buah
	Meja Rapat	:	36	buah
	Kursi Rapat	:	211	buah
	Almari	:	40	buah
	Filling Cabinet	:	20	buah
	Cash Box	:	1	buah
	Mesin Potong Rumput	:	5	buah
	Genset	:	4	buah
	Mesin Pompa Air	:	3	buah

	Almari Besi	:	10	buah
	Kipas Angin	:	4	buah
	Tangga Lipat	:	2	buah
	UPS	:	7	buah
	Sofa	:	1	set
	Dispenser	:	3	buah
	Rak Besi Kaca	:	1	buah
	Jam Dinding	:	7	buah
	Layar LCD	:	1	buah
	Sound System	:	1	buah

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya 2012 - 2016, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perindagkoptan Tahun 2012 – 2016 (Tabel 2.1)

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa program yang rasio capainnya kurang dari 90% yaitu pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan, indikator program (Penganekaragaman olahan pangan) Tahun 2015 (86,93%) dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi. Selanjutnya pada Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, indikator sasaran Tahun 2015 (82%) dan indikator program (kemampuan kelompok) Tahun 2015 (86%) dan Tahun 2016 (82%), dikarenakan anggaran lebih difokuskan pada peningkatan klas kelompok dan bukan untuk penumbuhan kelompok baru. Demikian juga pada program Pengembangan Budidaya Perikanan, indikator sasaran Tahun 2015 (66%) dan Tahun 2016 (88%) dan indikator program (Cakupan Bina Kelompok Perikanan) Tahun 2015 (44%) dan Tahun 2016 (88%) dikarenakan ada dukungan anggaran dari DIY untuk kegiatan yang sama dengan mata anggaran di Kota Yogyakarta. Sedangkan pada indikator program (Peningkatan Pelayanan Perbenihan) Tahun 2015 (0,0986%) dan Tahun 2016 (0,0041%) dikarenakan adanya kesalahan dalam penentuan target.

Indikator sasaran dan indikator program selain yang disebutkan di atas telah menunjukkan rasio capaian di atas 90%, dikarenakan penentuan target yang cermat dan kinerja yang baik.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan melekat pada Dinas Perindagkoptan. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah (Tabel 2.2)

Rata – rata rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 95,84% dan tahun 2016 sebesar 96,03%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran terendah ada pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Tahun 2014 sebesar 60,16% dikarenakan pada kedua program tersebut dianggarkan kegiatan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya aturan tentang calon penerima bansos yang harus berbadan hukum. Selain itu pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tahun 2014 sebesar 60,57% dikarenakan terdapat anggaran belanja bibit arwana yang tidak direalisasikan karena kesalahan plotting anggaran.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Faktor Internal

a. Kekuatan
   1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
   2) Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
   3) Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai

b. Kelemahan

1) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset belum optimal
2) Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan belum sinergis

2.4.2. Faktor Eksternal

a. Peluang
   1) Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
   2) Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai pusat distribusi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
   3) Berkembangnya minat masyarakat terhadap pertanian, peternakan dan perikanan yang bersifat rekreatif dan hobies

b. Ancaman
   1) Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
   2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
   3) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
   4) Berkurangnya lahan pertanian produktif

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian, kehewanan dan perikanan, serta ketahanan pangan maka indikator program yang hendak dicapai adalah

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut yaitu :

1. Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta tergantung dengan pasokan bahan pangan dari luar daerah
2. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan B2SA belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat
3. Masih ditemukannya bahan pangan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, disebabkan karena masih ada pelaku usaha yang belum menerapkan standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.
4. Kota Yogyakarta merupakan jalur lalu lintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

“ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke satu yaitu " Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat ".

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

1) Pertanian bukan prioritas pembangunan
2) Berkurangnya lahan pertanian produktif
3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset belum optimal
4) Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
5) Tidak semua pelaku usaha memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
6) Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai jalur lalu lintas hewan dari berbagai daerah sehingga perlu pengawasan intensif terhadap kemungkinan adanya zoonosis

Sedangkan faktor yang menjadi pendorong antara lain :

1) Pangan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2) Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
3) Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai pusat distribusi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
4) Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai jalur lalu lintas hewan dari berbagai daerah
5) Berkembangnya minat masyarakat terhadap pertanian dan perikanan yang bersifat rekreatif dan hobies
6) Gaya hidup sehat sudah mulai berkembang di masyarakat seiring dengan banyaknya kegiatan mengenai pentingnya hidup sehat

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROPINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Dan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Pelaksanaan Urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian di tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi Kementerian Pertanian yaitu "Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan

kesejahteraan petani" dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional" dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada peningkatan pendapatan keluarga petani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan, kecuali sasaran yang mengarah pada swasembada tanaman pangan dan peningkatan produksi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kota Yogyakarta.

Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L
1	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	Luas Lahan Pertanian semakin menurun
2	Peningkatan diversivikasi pangan	Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal
3	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	Program dan kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sudah dilaksanakan, namun pemasaran masih sebatas wilayah regional
4	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Tidak dilaksanakan
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Semua program dan kegiatan sudah diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani
6	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Semua program dan kegiatan sudah diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha perikanan

7	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Tidak ada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
8	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Tidak ada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
9	Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif	Tidak ada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
10	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Tidak ada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
11	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif	Tidak ada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian DIY, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan DIY dan Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY

Visi Dinas Pertanian DIY adalah ”Mewujudkan pertanian tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional” dengan sasaran peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani.

Visi BKPP DIY adalah ”Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudaya secara berkelanjutan melalui tercapainya kemadirian dan kedaulatan pangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien” dengan sasaran yang ingin dicapai adalah pemantapan ketersediaan dan konsumsi pangan, peningkatan kualitas penyuluhan dan kualitas kelembagaan pelaku usaha/utama.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah “Mewujudkan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera” dengan sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui peningkatan produksi perikanan dan berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya.

Visi dan sasaran dinas/badan ditingkat propinsi bersifat teknis dan lebih mudah diterapkan dengan visi dan sasaran di tingkat kabupaten/kota. Secara umum hampir semua sasaran di tingkat propinsi juga dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Pangan, kecuali sasaran yang mengutamakan peningkatan produksi tanaman pangan, ternak dan ikan, serta sasaran yang berhubungan dengan kelautan.

Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Renstra SKPD Propinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra SKPD Propinsi
1	Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)	Luas lahan pertanian terus berkurang tanpa bisa dihindari, sehingga produksi menurun
2	Meningkatkan populasi ternak	Luas lahan yang diperuntukkan untuk budidaya dan pengembangan ternak semakin menurun
3	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani	Kaderisasi SDM dan pengelola lembaga petani berjalan lambat
4	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Kurangnya kreatifitas pelaku usaha bidang pertanian karena sebagian besar pelaku usaha berusia lanjut
5	Pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat	Ketersediaan bahan pangan tidak stabil, karena bergantung pada pasokan dari luar daerah
		Konsumsi pangan masyarakat belum menerapkan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
6	Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha	Kualitas penyuluh dan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha perlu ditingkatkan.
7	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan rendah
8	Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan	Produksi perikanan konsumsi rendah

9	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim.	Tidak dilaksanakan
10	Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap	Belum semua usaha perikanan budidaya memiliki izin
11	Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat	Sudah dilaksanakan melalui kegiatan restocking ikan dan adanya Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perairan (Pokwasmas)

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;

f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan

sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partispasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan yang akan mempunyai pengaruh dampak relative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota

Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian, terdapat beberapa isu penting di Kota Yogyakarta yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis urusan pangan, kelautan dan perikanan dan pertanian yaitu :

1. Ketersediaan pangan (pertanian, peternakan, perikanan) yang aman dan bermutu perlu ditingkatkan
2. Konsumsi pangan belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
3. Pengawasan terhadap penyakit zoonosa harus terus dilaksanakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah " Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan "

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan yang hendak dicapai yaitu '' Ketersediaan dan Mutu Pangan Meningkat ''

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
2.	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil kehewanan dan perikanan	Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
3.	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian Meningkatkan mutu dan keamanan produk pertanian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 3 program yaitu :

1. Program Pembinaan Pertanian
2. Program Pembinaan Ketahanan Pangan
3. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1)

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022 serta isu-isu bidang pertanian, kehewanan dan kelautan dan ketahanan pangan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu 2017-2022. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2022, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Sasaran :															
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				**88%**	**90%**	**-**	**-**	**-**	**88%**	**90%**	**100%**	**100%**			
	Indikator Program:															
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan															
	Peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar higiene-sanitasi			Target PPH pada SPM = 90	- PPH 100	PPH 100	-	-	-	PPH : 86,93	PPH : 92,30	86,93	92,3			
					- 140 unit usaha.	- 150 unit usaha.	-	-	-	140 unit usaha	150 unit usaha	**100%**	**100%**			
					- sapi 7600 ekor,domba 5980 ekor	- sapi 7965 ekor,domba 6080 ekor	-	-	-	sapi: 8053 ekor, kambing/ domba 9880 ekor	sapi: 7930 ekor, kambing/domba 9285 ekor	105,96%, 165,22 %	99,56% , 152,71 %			
	Indikator Sasaran :															
	Cakupan bina kelompok petani				**304**	**318**	**-**	**-**	**-**	**206**	**302**	**68%**	**95%**			
	Indikator Program:															
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan															
	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok				10%	10%	-	-	-	10%	10%	100%	100%			
					308 klp tani/ternak	368 klp tani/ternak	-	-	-	264 klp tani/ternak	302 klp tani/ternak	86%	82%			

	Indikator Sasaran :															
	Cakupan bina kelompok perikanan				**88**	**95**	**-**	**-**	**-**	**58**	**84**	**66%**	**88%**			
	Indikator Program:															
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan															
	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok				42.638,585 kg	46.902,4435 kg	-	-	-	42,057 kg	19,192 kg	0,0986%	0,0041%			
					90 pokdakan: klas kel utama 1 madya 3 lanjut 16 pemula 70	95 pokdakan: klas kel utama 2 madya 4 lanjut 18 pemula 71	-	-	-	40 pokdakan klas kelompok utama 1 , madya 7, dan pemula 32	84 pokdakan dan poklahsar	44%	88%			
	Indikator Sasaran :															
	Indeks Pertanian dan Pangan															
							87,58	**93,05**	**94,23**							
	Indikator Program Dinas Pertanian dan Pangan															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran						100%	100%	100%							
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur															
	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai						100%	100%	100%							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						100%	100%	100%							
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan						100%	100%	100%							

5	Program Pembinaan Pertanian															
	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada produk pertanian						25%	14%	13%							
6	Program Pembinaan Ketahanan Pangan															
	Angka ketersediaan energi						2.400 kkal/kapita/hr	2.475 kkal/kapita/hr	2.500 kkal/kapita/hr							
7	Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan															
	Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP						100%	100%	100%							
	Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak						40	35	30							
	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan						10%	5%	3%							

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	896.215.500	1.573.108.925	1.034.427.159	1.235.073.368	3.836.205.270	Rp 774.938.455	Rp 1.487.763.343	942.879.785	1.190.595.966	3.716.053.320	86,47%	94,57%	91,15%	96,40%	96,87%	67,82%	73,44%
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	579.238.500	1.775.035.926	1.525.137.892	1.680.647.600	1.074.624.130	Rp 481.626.600	Rp 1.365.069.427	917.560.720	1.576.741.201	1.010.098.170	83,15%	76,90%	60,16%	93,82%	94,00%	41,63%	46,64%
3	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	92.522.150	586.906.384	556.204.712	644.046.030	503.248.200	Rp 84.850.120	Rp 542.197.738	336.908.075	626.752.160	489.321.732	91,71%	92,38%	60,57%	97,31%	97,23%	130,76%	141,31%

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai skor maksimal	Ketersediaan pangan belum mantap	Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta tergantung dengan pasokan bahan pangan dari luar daerah
		Pola konsumsi belum sesuai dengan prinsip konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan B2SA belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat
		Mutu dan keamanan pangan hasil peternakan, perikanan dan pertanian masih perlu ditingkatkan	Masih ditemukannya bahan pangan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, disebabkan karena masih ada pelaku usaha yang belum menerapkan standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan. Selain itu Kota Yogyakarta merupakan jalur lalu lintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan	Ketersediaan dan mutu pangan meningkat	Indeks Pertanian dan Pangan	87,58	93,05	94,23	95,01	95,66	96,32

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan

MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1.	**Meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan**	**Ketersediaan dan mutu pangan meningkat**	1.	Peningkatan ketahanan pangan	a.	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
					b.	Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
			2.	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil kehewanan dan perikanan	a.	Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan
					b.	Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
					c.	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
			3.	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	a.	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
					b.	Meningkatkan mutu dan keamanan produk pertanian

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22
Meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan	Ketersediaan dan mutu pangan meningkat	Indeks Pertanian dan Pangan	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**		**100%**	**1.636.551.700**	**100%**	**1.685.648.251**	**100%**	**1.736.217.699**	**100%**	**1.788.304.229**	**100%**	**1.841.953.356**	**100%**		
			a	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan Minum Pegawai	75	pegawai	Makan Minum Pegawai	199.950.000	Makan Minum Pegawai	205.948.500	Makan Minum Pegawai	212.126.955	Makan Minum Pegawai	218.490.764	Makan Minum Pegawai	225.045.487			
					Rapat Koordinasi	45	kali	Rapat Koordinasi		Rapat Koordinasi		Rapat Koordinasi		Rapat Koordinasi		Rapat Koordinasi				
					Tamu	1000	orang	Tamu		Tamu		Tamu		Tamu		Tamu				
					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	143	kali	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
			b	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan	Materai 6000 yang tersedia	1.800	lembar	Materai 6000 yang tersedia	1.166.721.700	Materai 6000 yang tersedia	1.201.723.351	Materai 6000 yang tersedia	1.237.775.052	Materai 6000 yang tersedia	1.274.908.303	Materai 6000 yang tersedia	1.313.155.552			
					Materai 3000 yang tersedia	1.200	lembar	Materai 3000 yang tersedia		Materai 3000 yang tersedia		Materai 3000 yang tersedia		Materai 3000 yang tersedia		Materai 3000 yang tersedia				
					STNK Roda 4 Yang Terbayar	8	unit	STNK Roda 4 Yang Terbayar		STNK Roda 4 Yang Terbayar		STNK Roda 4 Yang Terbayar		STNK Roda 4 Yang Terbayar		STNK Roda 4 Yang Terbayar				
					STNK Roda 3 Yang Terbayar	6	unit	STNK Roda 3 Yang Terbayar		STNK Roda 3 Yang Terbayar		STNK Roda 3 Yang Terbayar		STNK Roda 3 Yang Terbayar		STNK Roda 3 Yang Terbayar				
					STNK Roda 2 Yang Terbayar	29	unit	STNK Roda 2 Yang Terbayar		STNK Roda 2 Yang Terbayar		STNK Roda 2 Yang Terbayar		STNK Roda 2 Yang Terbayar		STNK Roda 2 Yang Terbayar				
					Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia	25	jenis	Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia		Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia		Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia		Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia		Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia				
					Jasa Kebersihan kantor	12	bulan	Jasa Kebersihan kantor		Jasa Kebersihan kantor		Jasa Kebersihan kantor		Jasa Kebersihan kantor		Jasa Kebersihan kantor				
					Alat Tulis Kantor yang tersedia	56	jenis	Alat Tulis Kantor yang tersedia		Alat Tulis Kantor yang tersedia		Alat Tulis Kantor yang tersedia		Alat Tulis Kantor yang tersedia		Alat Tulis Kantor yang tersedia				
					Jasa Cetak	1	jenis	Jasa Cetak		Jasa Cetak		Jasa Cetak		Jasa Cetak		Jasa Cetak				
					Jasa Penggandaan	164.350	lembar	Jasa Penggandaan		Jasa Penggandaan		Jasa Penggandaan		Jasa Penggandaan		Jasa Penggandaan				
					Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10	jenis	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan				
					Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik yang tersedia	3	lokasi	Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik		Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik		Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik		Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik yang		Jasa Komunikasi, sumberdaya dan listrik				
					Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia	3	jenis	Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia		Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia		Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia		Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia		Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia				
					Jasa Perbaikan peralatan kerja	1	jenis	Jasa Perbaikan peralatan kerja		Jasa Perbaikan peralatan kerja		Jasa Perbaikan peralatan kerja		Jasa Perbaikan peralatan kerja		Jasa Perbaikan peralatan kerja				
					Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	15	jenis	Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia				
					Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	kali	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	2	jenis	Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia				
					Jasa Keamanan	12	bulan	Jasa Keamanan		Jasa Keamanan		Jasa Keamanan		Jasa Keamanan		Jasa Keamanan				
			c	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4	jenis	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	269.880.000	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	277.976.400	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	286.315.692	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	294.905.163	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	303.752.318			
					Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	62	Dok ASN	Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola				
					Jasa Tenaga bantuan	10	org	Jasa Tenaga bantuan		Jasa Tenaga bantuan		Jasa Tenaga bantuan		Jasa Tenaga bantuan		Jasa Tenaga bantuan				
					Jasa Pengelola Arsip	1	org	Jasa Pengelola Arsip		Jasa Pengelola Arsip		Jasa Pengelola Arsip		Jasa Pengelola Arsip		Jasa Pengelola Arsip				
			2	**Program Peningkatan Sarana dan Aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**		**100%**	**538.593.000**	**100%**	**554.750.790**	**100%**	**571.393.314**	**100%**	**588.535.113**	**100%**	**606.191.167**	**100%**		
			a	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	8	lokasi	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	240.780.000	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	248.003.400	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	255.443.502	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	263.106.807	Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin	271.000.011			
			b	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dlnas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	8	unit	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	297.813.000	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	306.747.390	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	315.949.812	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	325.428.306	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4	335.191.155			
					Jasa pemeliharaan rutin/	6	unit	Jasa pemeliharaan rutin/		Jasa pemeliharaan rutin/		Jasa pemeliharaan rutin/		Jasa pemeliharaan rutin/		Jasa pemeliharaan rutin/				
					Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2	29	unit	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2				

					Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2	29	unit	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2				
				3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**		**100%**	**100%**	**6.000.000**	**100%**	**6.180.000**	**100%**	**6.365.400**	**100%**	**6.556.362**	**100%**	**6.753.053**	**100%**			
				a	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekwensi diklat formal yang diikuti	2	kl	Frekwensi diklat formal yang diikuti	6.000.000	Frekwensi diklat formal yang diikuti	6.180.000	Frekwensi diklat formal yang diikuti	6.365.400	Frekwensi diklat formal yang diikuti	6.556.362	Frekwensi diklat formal yang diikuti	6.753.053				
				4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan**		**100%**	**100%**	**93.298.000**	**100%**	**96.096.940**	**100%**	**98.979.848**	**100%**	**101.949.244**	**100%**	**105.007.721**	**100%**			
				b	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5	dok	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	93.298.000	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	96.096.940	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	98.979.848	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	101.949.244	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	105.007.721			
						Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5	dok	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)				
				5	**Program Pembinaan Pertanian**	**Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian**		**25%**	**25%**	**729.096.670**	**14%**	**750.969.570**	**13%**	**773.498.657**	**12%**	**796.703.617**	**11%**	**820.604.725**	**10%**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Kota Yogyakarta**
				a	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Kebun yang terkelola dengan baik	4	lokasi	Kebun yang terkelola dengan baik	625.994.250	Kebun yang terkelola dengan baik	644.774.078	Kebun yang terkelola dengan baik	664.117.300	Kebun yang terkelola dengan baik	684.040.819	Kebun yang terkelola dengan baik	704.562.043				
						Kelompok tani /Gapoktan yang dibina	153/45	poktan/ gapoktan	Kelompok tani /Gapoktan yang dibina		Kelompok tani /Gapoktan yang dibina		Kelompok tani /Gapoktan yang dibina		Kelompok tani /Gapoktan yang dibina		Kelompok tani /Gapoktan yang dibina					
						Kontes tanaman hias	1	kl	Kontes tanaman hias		Kontes tanaman hias		Kontes tanaman hias		Kontes tanaman hias		Kontes tanaman hias					
						Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	4	kl	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida					
						Dokumen data statistik pertanian	1	dokumen	Dokumen data statistik pertanian		Dokumen data statistik pertanian		Dokumen data statistik pertanian		Dokumen data statistik pertanian		Dokumen data statistik pertanian					
						Kampung Agro Rejowinangun	1	lokasi	Kampung Agro Rejowinangun		Kampung Agro Rejowinangun		Kampung Agro Rejowinangun		Kampung Agro Rejowinangun		Kampung Agro Rejowinangun					
						Gelar Potensi Pertanian	1	kali	Gelar Potensi Pertanian		Gelar Potensi Pertanian		Gelar Potensi Pertanian		Gelar Potensi Pertanian		Gelar Potensi Pertanian					
				b	Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	12	bulan	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	103.102.420	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	106.195.493	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	109.381.357	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	112.662.798	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	116.042.682				
						Uji mutu bahan pangan	250	sampel	Uji mutu bahan pangan		Uji mutu bahan pangan		Uji mutu bahan pangan		Uji mutu bahan pangan		Uji mutu bahan pangan					
				6	**Program Pembinaan Ketahanan Pangan**	**Angka ketersediaan energi**	**2.400 kkal/kapita/hr**		**2.400 kkal/kapita/hr**	**662.590.920**	**2.475 kkal/kapita/hr**	**682.468.648**	**2.500 kkal/kapita/hr**	**702.942.707**	**2.500 kkal/kapita/hr**	**724.030.988**	**2.500 kkal/kapita/hr**	**745.751.918**	**2.500 kkal/kapita/hr**			
				a	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	1	dokumen	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	535.969.795	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	552.048.889	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	568.610.356	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	585.668.666	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	603.238.726				
						Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1	dokumen	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)					
						Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	3	kali	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan		Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan		Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan		Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan		Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan					
						Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	7	kali	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)		Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)		Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)		Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)		Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)					
						Lomba Bidang Ketahanan Pangan	3	kali	Lomba Bidang Ketahanan Pangan		Lomba Bidang Ketahanan Pangan		Lomba Bidang Ketahanan Pangan		Lomba Bidang Ketahanan Pangan		Lomba Bidang Ketahanan Pangan					
						Bimtek Kampung Pangan Lestari	14	kali	Bimtek Kampung Pangan Lestari		Bimtek Kampung Pangan Lestari		Bimtek Kampung Pangan Lestari		Bimtek Kampung Pangan Lestari		Bimtek Kampung Pangan Lestari					
						Penyuluhan Ketahanan Pangan	3	jenis	Penyuluhan Ketahanan Pangan		Penyuluhan Ketahanan Pangan		Penyuluhan Ketahanan Pangan		Penyuluhan Ketahanan Pangan		Penyuluhan Ketahanan Pangan					
				b	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1	dokumen	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	126.621.125	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	130.419.759	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	134.332.352	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	138.362.322	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	142.513.192				
						Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	dokumen	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					
						Sosialisasi Distribusi beras baru	5	kali	Sosialisasi Distribusi beras baru		Sosialisasi Distribusi beras baru		Sosialisasi Distribusi beras baru		Sosialisasi Distribusi beras baru		Sosialisasi Distribusi beras baru					

			7	**Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan**	**1. Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP**	**100%**		**100%**	**2.076.007.152**	**100%**	**2.138.287.367**	**100%**	**2.202.435.988**	**100%**	**2.268.509.067**	**100%**	**2.336.564.339**	**100%**		
					2. Jumlah tipiring kasus prosuk hasil ternak	**40**		**40**		**35**		**30**		**25**		**20**		**15**		
					3. Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	**10%**		**10%**		**5%**		**3%**		**2%**		**1%**		**0%**		
			a	Pembinaan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan	Pelayanan Poliklinik Hewan	12	bulan	Pelayanan Poliklinik Hewan	1.316.214.462	Pelayanan Poliklinik Hewan		Pelayanan Poliklinik Hewan		Pelayanan Poliklinik Hewan		Pelayanan Poliklinik Hewan				
					Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	100	persen	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa		Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa		Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa		Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa		Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa				
					Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	2	lokasi	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik		Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik		Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik		Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik		Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik				
					Penguatan jejaring komunitas	5	kl	Penguatan jejaring komunitas		Penguatan jejaring komunitas		Penguatan jejaring komunitas		Penguatan jejaring komunitas		Penguatan jejaring komunitas				
					Dokumen Updating Data Peternakan	1	dokumen	Dokumen Updating Data Peternakan		Dokumen Updating Data Peternakan		Dokumen Updating Data Peternakan		Dokumen Updating Data Peternakan		Dokumen Updating Data Peternakan				
					Dokumen Updating Data Perikanan	1	dokumen	Dokumen Updating Data Perikanan		Dokumen Updating Data Perikanan		Dokumen Updating Data Perikanan		Dokumen Updating Data Perikanan		Dokumen Updating Data Perikanan				
					Restocking Ikan	20.000	bibit	Restocking Ikan		Restocking Ikan		Restocking Ikan		Restocking Ikan		Restocking Ikan				
					Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	2	kelompok	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan				
					Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	11	klp	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan		Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan				
			b	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	415	TPH	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	759.792.690	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban		Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban		Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban		Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban				
					Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	7	kl	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan		Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan		Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan		Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan		Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan				
					Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya	149	unit	Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya		Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya		Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya		Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya		Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya				
					Pelayanan Rumah Potong Hewan	12	bulan	Pelayanan Rumah Potong Hewan		Pelayanan Rumah Potong Hewan		Pelayanan Rumah Potong Hewan		Pelayanan Rumah Potong Hewan		Pelayanan Rumah Potong Hewan				
					Uji Mutu Laboratoris	2200	sampel	Uji Mutu Laboratoris		Uji Mutu Laboratoris		Uji Mutu Laboratoris		Uji Mutu Laboratoris		Uji Mutu Laboratoris				
					Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	9	kali	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan		Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan		Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan		Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan		Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan				

Tabel 7.1

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Sasaran dan Program		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				1	2	3	4	5	6	
	Ketersediaan dan mutu pangan meningkat									
		Indeks Pertanian dan Pangan	87,58	87,58	93,05	94,23	95,01	95,66	96,32	96,32
1	Program Pembinaan Pertanian									
	a	Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian	25%	25%	14%	13%	12%	11%	10%	10%
2	Program Pembinaan Ketahanan Pangan									
	a	Angka ketersediaan energi	2.400 kkal/kapita/hr	*2.400 kkal/kapita/hr*	*2.475 kkal/kapita/hr*	*2.500 kkal/kapita/hr*	*2.500 kkal/kapita/hr*	*2.500 kkal/kapita/hr*	*2.500 kkal/kapita/hr*	*2.500 kkal/kapita/hr*
3	Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan									
	a	Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	40	40	35	30	25	20	15	15
	c	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	10%	10%	5%	3%	2%	1%	0%	0%

BERITA ACARA REVIU RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2017 – 2022

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan belas, telah dilaksanakan Reviu Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Reviu dilakukan pada target capaian program tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja tahun 2017, dengan hasil reviu sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembinaan Pertanian	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada produk pertanian	Jumlah sampel produk pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk pertanian	14%	13%	12%	11%	10%
2	Pembinaan Kehewanan dan Perikanan	Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosa	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	35	30	25	20	15
		Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	Jumlah olahan ikan yang menggunakan bahan berbahaya dibagi jumlah olahan ikan dikali 100%	5%	3%	2%	1%	0%
3	Pembinaan Ketahanan Pangan	Angka ketersediaan energi makanan	Hasil analisa neraca bahan makanan	2.475 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari

Demikian Berita Acara ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2018 sd 2022.

Yogyakarta, 25 April 2018

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Sugeng Darmanto	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Ir. M Imam Nurwahid	Ka. Bidang Pertanian	
3	Drh. Endang Finiarti	Ka. Bidang Kehewanan dan Perikanan	
4	Drh. Aladria	Ka. Bidang Ketahanan Pangan	

BERITA ACARA REVIEW RENSTRA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

1. **Tingkat Realisasi OPD**

Sasaran : Ketersediaan dan mutu pangan meningkat
Indikator : Indeks Pertanian dan Pangan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	87.58 %	93,05 %	94,23 %	95,01 %	95,66 %	96,32 %
Realisasi	92,11 %					

2. **Tingkat Realisasi Program**

Program : Program pembinaan ketahanan pangan
Indikator: : Angka ketersediaan energi makanan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	2.400 kkal/kapita /hari	2.475 kkal/kapita /hari	2.500 kkal/kapita /hari	2.500 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari	2.500 kkal/kapita/ hari
Realisasi	2472 kkal/kapita /hari					

3. **Tingkat Realisasi Program**

Program : Program pembinaan kehewanan dan perikanan
Indikator : Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%					

4. **Tingkat Realisasi Program**

Program : Program pembinaan kehewanan dan perikanan
Indikator : Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	40	35	30	25	20	15
Realisasi	42					

5. **Tingkat Realisasi Program**

Program : Program pembinaan kehewanan dan perikanan
Indikator : Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	10%	5%	3%	2%	1%	0%
Realisasi	5.06%					

6. **Tingkat Realisasi Program**

Program : Program pembinaan pertanian
Indikator: : Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	25%	14%	13%	12%	11%	10%
Realisasi	15.91%					

7. **Keterangan**

Review dilakukan terhadap target program yang pencapaian Tahun 2017 telah melampui target Tahun 2018 atau tahun setelahnya. Review target dilakukan agar terjadi keselarasan antara kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dengan dokumen perencanaan.

Perwakilan Bappeda : (Sunujana)

Perwakilan OPD : (Sita Diani Putri).